



# Inspektorat Daerah Provinsi Banten

# RE NJA



Rencana Kerja  
Tahun 2022



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya, bahwa kami telah dapat menyusun suatu dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya kami mengharapkan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kegiatan Pengawasan secara tepat dan terarah.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dengan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Serang, Februari 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.**  
NIP. 19630324 198402 1 001



## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR .....** ..... i

**DAFTAR ISI .....** ..... ii

**BAB I PENDAHULUAN .....** ..... 1

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 1.1. | Latar Belakang .....  | 1 |
| 1.2. | Landasan Hukum .....  | 2 |
| 1.3. | Maksud Dan Tujuan .....   | 2 |
| 1.4. | Sistematika Penulisan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022..... | 3 |

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 DAN RENJA MURNI TAHUN 2022 ...** 5

- |      |   |    |
|------|---|----|
| 2.1. | Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra OPD .....                 | 5  |
| 2.2. | Capaian Kinerja .....   | 16 |
| 2.3. | Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Banten..... | 24 |
| 2.4. | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....   | 26 |
| 2.5. | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                 | 29 |

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....** 30

- |      |  |    |
|------|--|----|
| 3.1. | Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 ..... | 30 |
| 3.2. | Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....                        | 30 |
| 3.3. | Program Dan Kegiatan .....   | 31 |

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....** 46

**BAB V PENUTUP .....** ..... 49



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Provinsi Banten memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten. Akuntabilitas sebagai perwujudan tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang ada di Pemerintah Provinsi Banten harus dikelola dan dijaga agar dapat mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Governance* pada Pemerintah Provinsi Banten.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Provinsi Banten berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat.

Sebagai bagian dari pemerintahan Provinsi Banten, Inspektorat mendukung visi Gubernur terpilih yaitu “**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**” Visi tersebut kemudian diterjemahkan kedalam Misi Gubernur yang merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah dalam mewujudkan Visi. Dalam pelaksanaannya Inspektorat mendukung misi pertama, yaitu : **MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun **Tujuan RPJMD** Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah “ Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompетensi serta melayani masyarakat ”. Sedangkan Tujuan dari Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Banten berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi



Banten Tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditentukan dari nilai maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 adalah :

- a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

## 1.3. Maksud Dan Tujuan

### A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten



Tahun 2017-2022 kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan.

Lebih jauh lagi penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 adalah:

- 1) Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten;
- 2) Untuk mengidentifikasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten tahun 2022 berdasarkan kebijakan, evaluasi periode sebelumnya, permasalahan obyektif yang dihadapi, rencana kinerja, rencana biaya serta lokasi dan kelompok sasaran.
- 3) Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- 4) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten;
- 5) Memberikan pedoman kepada Inspektorat Provinsi Banten dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- 6) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

## 1.4. Sistematika Penulisan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, dan mengemukakan keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra SKPD, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.



Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta garis besar isi dokumen.

## **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD/ Inspektorat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat uraian kinerja pelayanan SKPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

## **BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja perubahan SKPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan kegiatan, memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan kegiatan).

## **BAB IV Penutup**

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **Lampiran – Lampiran**



## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 DAN RENJA MURNI TAHUN 2022

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra OPD

Inspektorat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi bagian pembinaan dan pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kinerja Inspektorat khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan entitas seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 serta progres capaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten Periode 2017-2022 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Terkait dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021 pada umumnya realisasi program kegiatan telah tercapai sesuai dengan target penyerapan anggaran maupun target kinerja yang telah ditentukan, walaupun masih terdapat program kegiatan yang capaiannya tidak 100%.

Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 dan prakiraan yang dijabarkan dalam program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Capaian Nilai SAKIP OPD		80	72.83	75	72.83	97%		85	77.92	96%
Program Tata kelola Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00%	97.10%	100%	97.00%	97.00%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100.00%	91.67%	96.00%
Terselenggaranya Perencanaan dan Pelaporan Secara Optimal	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	98%	100%	98%	98%	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	98%



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							perangkat daerah			
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	96%	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	96%



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana kantor	Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	100%	98%	100%	98%	96%	Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	100%	100%	96%
Meningkatnya Kopetensi Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	90%	100%	90%	90%	Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	67%	90%
Terkelolaanya arsip dan pengadaan buku perpustakaan	dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat			



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Daerah			
Tersedianya data informasi pembangunan daerah		100%	98%	100%	98%	100%				
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor Secara Berkala		100%	95%	100%	95%	98%				
Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasaran Kantor		100%	100%	100%	100%	100%				



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Peningkatan koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah		100%	100%	100%	100%	96%				
Capaian Maturitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	-	3	3	3	3	Capaian Maturitas SPIP	4	3	75%
Capaian Kapabilitas APIP		-	-	3	-	3				
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	92.75%	90.75%	100%	90.75%	95.25%	Penyelenggaraan Pengawasan	100.00%	132.30%	132.30%



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan serta SOP Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Dalam Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	90%	92%	100%	92%	90%	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Meningkatnya Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pendapatan Provinsi Banten	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	92%	95%	100%	95%	96%	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	100%	151%	151%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyimpangan Dalam	Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	98%	100%	100%	100%	95%	Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	100%	98%	98%



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah										
Meningkatnya Pengawasan Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah	90%	82%	100%	82%	98%	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100%	100%	100%



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Meningkatnya Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	82%	82%	100%	82%	90%	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	177%	177%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	90%	90%	100%	90%	98%	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	100%	200%	200%



Program/Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Sesuai dengan Kepmendagri No.90 Tahun 2021	Capaian		
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Level Kapabilitas APIP	100%	85%	100%	85%	95%	Capaian Level Kapabilitas APIP	3	3	100%
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	93%	100%	92.75%	92.75%	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%
	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	93%	100%	92.75%	92.75%	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	100%	100%

## 2.2. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Inspektorat Daerah provinsi Banten tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten dengan hasil realisasinya pada tahun 2021.

Adapun target capaian kinerja sasaran tahun 2021 berdasarkan dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator sasaran  
Tahun 2021

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP	Nilai	85	77,92	92%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Level	4	3	75%
		Capaian level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan masih terdapat target kinerja sasaran dengan realisasinya dibawah 100%, terutama pada indikator kinerja sasaran capaian maturitas SPIP. Namun demikian jika dilihat dari capaian program dan kegiatan yang menunjang pada capaian target kinerja sasaran tersebut, menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Penjelasan terkait kondisi tersebut akan diuraikan kemudian melalui analisis penyebab peningkatan dan penurunan capaian kinerja pada sub bab berikutnya dalam dokumen ini. Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.3

Tabel Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2021		Target Renstra Tahun 2021
						Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif dan efisien		Capaian SAKIP OPD		Nilai	85	77,92	85
		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Per센	100	100	100
				Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Per센	100	100	100
				Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	Per센	100	100	100
				Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Per센	100	66,7	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan		Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP		Nilai	4	3	4



daerah							
		<b>Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Persen	100	100	100
			Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100
			Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Persen	100	151	100
			Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Persen	100	98	100
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Persen	100	100	100
			Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persen	100	177	100
			Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Persen	100	200	100
			<b>Capaian Level Kapabilitas APIP</b>	<b>Level</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		<b>Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan</b>	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persen	100	100	100

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegalangannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten selama Tahun 2021.

### **Capaian Sasaran 1, Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien**

Sasaran ke- 1 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	:	Nilai 85
Realisasi	:	Nilai 77,92
Capaian	:	92%

Capaian Indikator kinerja pada sasaran ke-1 yang masih menujukan persentase dibawah 100% lebih disebabkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat efisiensi dalam penyerapan anggaran dikarenakan terkendala dengan kondisi pandemi covid-19 sehingga pada beberapa pos rekening anggaran tidak dapat dilaksanakan;
- b. Pelaksanaan diklat belum sepenuhnya optimal dikarenakan kondisi pandemi covid 19, mengakibatkan terdapat beberapa jadwal yang telah ditargetkan tidak tercapai dengan baik sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya.

### **Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah**

Sasaran ke- 2 memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan capaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

**IKU pertama** yaitu **Capaian Maturitas SPIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	:	Level 4
Realisasi	:	Level 3
Capaian	:	75%

Jika dilihat dari perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dan capaian indikator kinerja program melalui pelaksanaan indikator kinerja kegiatan, menunjukan hasil yang tidak selaras, dimana capaian indikator kinerja program yang tinggi tidak berpengaruh terhadap hasil capaian indikator kinerja sasaran. Kondisi tersebut lebih disebabkan pada permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

- a. Perubahan target indikator kinerja capaian sasaran pada saat penetapan RPJMD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu capaian maturitas SPIP, dari semula level 3 menjadi level 4;
- b. Data capaian kinerja atas indikator tersebut bersumber dari data eksternal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan



dan Pembangunan pada tahun 2019 melalui hasil *Quality Assurance (QA)* atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Banten, sehingga capaian kinerja untuk Tahun 2021 belum dilaksanakan penilaian ulang.

- c. Terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang tidak mendukung pada pencapaian maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang mengakibatkan beberapa aktivitas yang dilaksanakan tidak berpengaruh terhadap penilaian pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

**IKU Kedua** yaitu **Level Kapabilitas APIP**, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target	:	Level 3
Realisasi	:	Level 3
Capaian	:	100%

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, sehingga dapat memberi arahan maupun saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten;
- b. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan pihak ekternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Banten;
- c. Kompetensi dan integritas para ASN yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
- d. Adanya *reward and punishment* bagi ASN, sehingga dapat menimbulkan semangat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;

#### **Realisasi Anggaran**

Alokasi APBD Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dengan Total Belanja daerah sebesar Rp.70.364.066.518,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.55.336.902.768,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.15.027.163.750,00. Persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 78.64% dari total anggaran, sedangkan Belanja Langsung hanya 21.36% dari anggaran. Pada Belanja Langsung, anggaran paling besar ada pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan internal dengan persentase 37.77% dari total anggaran Belanja Langsung.



Tabel 2.4  
Anggaran Tahun 2021

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	T A R G E T K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>55.336.902.768,00</b>
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Bulan	54.957.582.768,00 335.850.000,00 43.470.000,00
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>15.027.163.750,00</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen 18 Laporan 4 Dokumen	<b>6.885.793.500,00</b> <b>81.585.000,00</b> 52.085.000,00 6.100.000,00 23.400.000,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan 1 Kegiatan	<b>674.500.000,00</b> 52.000.000,00 622.500.000,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan 1 Kegiatan	<b>1.676.859.400,00</b> 98.000.000,00 431.068.400,00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	T A R G E T K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan	285.195.000,00 232.924.000,00 629.672.000,00
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin 1 Lainnya		<b>537.989.000,00</b> 37.989.000,00
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Kegiatan	500.000.000,00
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan 12 Bulan	641.462.400,00 1.822.003.600,00
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit 23 Unit 146 Unit	187.410.000,00 384.838.000,00 131.770.000,00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	T A R G E T K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan	747.376.100,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>6.549.159.250,00</b>
7	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b> 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Kegiatan 25 Kegiatan 7 Kegiatan 12 Kegiatan 8 Kegiatan	<b>5.676.153.250,00</b> 305.300.000,00 4.092.381.250,00 280.650.000,00 570.123.000,00 427.699.000,00
8	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b> 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Bulan 1 Kegiatan	<b>873.006.000,00</b> 138.320.000,00 734.686.000,00
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>1.592.211.000,00</b>
9	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b> 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12 Kegiatan	<b>512.590.000,00</b> 512.590.000,00
10	<b>Pendampingan dan Asistensi</b> 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	18 Kegiatan 1 Kegiatan	<b>1.079.621.000,00</b> 662.595.000,00 45.050.000,00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	T A R G E T K I N E R J A	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4
	Reformasi Birokrasi  3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 Kegiatan  1 Kegiatan	358.276.000,00  13.700.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>70.364.066.518,00</b>

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Banten**

Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai *Quality Assurance* mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mengawal kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
- b. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
- c. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
- d. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;



- 
- e. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.
  - f. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;
  - g. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;
  - h. Masih tingginya pelanggaran penyalahgunaan anggaran yang berakibat masih adanya pengembalian untuk pajak maupun keuangan daerah, hal ini masih lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat.
  - i. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
  - j. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.



## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan serta rancangan awal RKPD Inspektorat sebagai berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan RKPD 2022

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD								
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022																		
Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022																		
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																		
Kode					Uraian					Sumber Dana	Lokasi	T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5														
6	01	01	1.01	01	6					7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
6	01	01	1.01	01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01	01	1.01	01	INSPEKTORAT DAERAH										59.927.967.000			
6	01	01	1.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										51.052.090.000			
6	01	01	1.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										259.627.000			
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		180.845.000	0	0	0	180.845.000	
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		27.600.000	0	0	0	27.600.000	
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		51.182.000	0	0	0	51.182.000	
6	01	01	1.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										43.685.820.000			
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		43.297.800.000	0	0	0	43.297.800.000	
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		338.550.000	0	0	0	338.550.000	
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		49.470.000	0	0	0	49.470.000	
6	01	01	1.05	01	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah										450.000.000			
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		450.000.000	0	0	0	450.000.000	
6	01	01	1.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.307.195.600			
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		107.800.000	0	0	0	107.800.000	

Activ  
Go to !



Urutan	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1			
					T-1	T				Jumlah				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		348.781.600	0	0	0	348.781.600	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		313.714.000	0	0	0	313.714.000	
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		350.000.000	0	0	0	350.000.000	
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		186.900.000	0	0	0	186.900.000	
6	01	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				0	<b>166.516.000</b>	0	0	<b>166.516.000</b>	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		0	166.516.000	0	0	166.516.000	
6	01	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.648.216.400</b>	0	0	0	<b>2.648.216.400</b>	
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		641.462.400	0	0	0	641.462.400	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		2.006.754.000	0	0	0	2.006.754.000	
6	01	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.534.715.000</b>	0	0	0	<b>2.534.715.000</b>	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		75.910.000	0	0	0	75.910.000	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		555.020.000	0	0	0	555.020.000	
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		131.770.000	0	0	0	131.770.000	
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		1.772.015.000	0	0	0	1.772.015.000	
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				<b>7.381.913.000</b>	0	0	0	<b>7.381.913.000</b>	
6	01	02	1.01		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>				<b>6.518.218.000</b>	0	0	0	<b>6.518.218.000</b>	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		638.846.000	0	0	0	638.846.000	
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		4.995.952.000	0	0	0	4.995.952.000	
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		182.350.000	0	0	0	182.350.000	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		217.340.000	0	0	0	217.340.000	

Acti  
do to



Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
				T-1	T									T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		483.730.000		0	0	0	483.730.000				
6 01 02 1.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>				<b>863.695.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863.695.000</b>				
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		144.420.000		0	0	0	144.420.000				
6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		719.275.000		0	0	0	719.275.000				
6 01 03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				<b>1.493.964.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.493.964.000</b>				
6 01 03 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>				<b>161.177.250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.177.250</b>				
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		161.177.250		0	0	0	161.177.250				
6 01 03 1.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>				<b>1.332.786.750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.332.786.750</b>				
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		595.275.000		0	0	0	595.275.000				
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		138.240.000		0	0	0	138.240.000				
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		480.731.750		0	0	0	480.731.750				
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Serang, Curug, Sukajaya		118.540.000		0	0	0	118.540.000				



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan pembangunan yang diselenggaranakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten bersama dengan para pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum musrenbang tersebut untuk Inspektorat Daerah Provinsi Banten.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

Pelaksanaan program kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Banten memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat, antara lain :

- a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten 2017-2022. Di samping itu, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022. Target tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Banten tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
				2021
1.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD	Nilai	90
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	4
		Capaian Level Kapabilitas APIP	Level	4



### **3.3. Program Dan Kegiatan**

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) program antara lain:

- a. Program Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk Kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran.

Secara keseluruhan terdapat 11 (sepuluh) rencana kegiatan untuk anggaran tahun 2022 pada Inspektorat Provinsi Banten antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah;
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
- j. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- k. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Program dan kegiatan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Dokumen
						Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan
	Persentase Sarana Prasarana		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Kegiatan
		100%			100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Kegiatan



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
	Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Kegiatan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
				Daerah	100%		Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	23 Unit



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
						Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Kegiatan



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
					100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Dokumen
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022
							SKPD	
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2022
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	100%				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Dokumen	
	Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan	100%							



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022
	Provinsi Banten					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	100%						
	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan	100%				Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	12 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022
	Pemberantasan Korupsi							
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Percentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Dokumen
	Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa	100%		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
	dan Bantuan Keuangan Daerah							
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan
								Tahun 2022
			Pendampingan dan Asistensi	Percentase Ketercapaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	100%	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 Dokumen
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen



Program	Indikator Program	Target Indikator Program Tahun 2022	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2022	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja Sub Kegiatan	Tahun 2022
								Korupsi	
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Dokumen	



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Banten, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Banten berpedomanan pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2022, seperti pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3
A	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>43,685,820,000.00</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43,297,800,000.00
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	338,550,000.00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	49,470,000.00
B	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>16,242,147,000.00</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>259,627,000.00</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	180,845,000.00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	27,600,000.00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,182,000.00
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>450,000,000.00</b>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	450,000,000.00
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,307,195,600.00</b>
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107,800,000.00
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	348,781,600.00
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	313,714,000.00
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000.00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3
	5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	186,900,000.00
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>166,516,000.00</b> 166,516,000.00
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>2,648,216,400.00</b> 641,462,400.00 2,006,754,000.00
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>2,534,715,000.00</b> 75,910,000.00 555,020,000.00 131,770,000.00 1,772,015,000.00
7	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b> 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3 Reviu Laporan Kinerja 4 Reviu Laporan Keuangan 5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<b>6,518,218,000.00</b> 638,846,000.00 4,995,952,000.00 182,350,000.00 217,340,000.00 483,730,000.00
8	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b> 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<b>863,695,000.00</b> 144,420,000.00 719,275,000.00
9	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b> 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<b>161,177,250.00</b> 161,177,250.00



No.	Nama Kegiatan Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3
10	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>  1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<b>1,332,786,750.00</b>  595,275,000.00 138,240,000.00 480,731,750.00 118,540,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>59,927,967,000.00</b>



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan menjabarkan Kebijakan dan Program Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ke dalam kegiatan, dalam rangka mendukung Prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022, selanjutnya dijabarkan dalam 3 (tiga) Program antara lain :

- a. Program Penunjang Umum Pemerintah Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan Pemdampingan dan Asistensi

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam 11 (Sebelas) rencana kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Tahun 2020 dan 2021 serta penjabaran dari isu dan permasalahan yang ada, diantaranya :

- a. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap satuan Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten yang memiliki latar belakang pengalaman di bidang pengawasan.
- c. Kebijakan penyelenggaraan pengawasan terhadap azaz dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan efektif.



- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dibuat sering mengalami perubahan jadwal pelaksanaan.
- e. Belum adanya sinkronisasi Program Kerja Pengawasan antara BPKP dengan Inspektorat Daerah Provinsi Banten.

Serang, Februari 2022

**INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA.**

NIP. 19630324 198402 1 001



inspektoratbanten



<https://inspektorat.bantenprov.go.id/>



Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten  
(KP3B), Palima, Curug, Serang